

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Resource Based Theory*

Resource based theory (RBT) berpandangan perusahaan akan memenangkan persaingan usaha dan memperoleh kinerja keuangan yang baik dengan cara mengelola dan memanfaatkan aset-aset strategis yang dimiliki, baik yang tangible maupun yang intangible (Wernerfelt, 1984). RBT berfungsi sebagai kerangka kerja penting untuk menjelaskan dan memprediksi apa yang dapat menjadi dasar untuk keunggulan kompetitif dan kinerja perusahaan (Barney, dkk., 2011). Perusahaan yang memiliki sumber daya yang berbeda dan kemampuan mengelola akan memperoleh keunggulan kompetitif merupakan suatu pemikiran yang telah berkembang dalam teori manajemen strategi dan keunggulan kompetitif perusahaan yang meyakini bahwa perusahaan dapat mencapai keunggulan apabila memiliki sumber daya yang unggul (Apriliani, dkk., 2020). *Resource Based Theory* merupakan teori yang membahas bagaimana perusahaan tersebut dapat mengolah dan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya, sumber daya perusahaan dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu sumber daya yang berwujud, tidak berwujud dan sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya seperti karyawan (*human capital*), aset fisik (*physical capital*) maupun *structural capital* akan menciptakan *value added* bagi perusahaan sehingga dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan perusahaan (Nikmah dan Apriyanti, 2019).

Resource based theory suatu perusahaan akan unggul dalam persaingan usaha dan mendapatkan kinerja perusahaan yang baik dengan memiliki, menguasai dan memanfaatkan aset – aset strategis yang penting (aset berwujud dan tidak berwujud) (Belkaoui, 2003). Strategi yang potensial untuk meningkatkan kinerja perusahaan adalah dengan menyatukan aset berwujud dan aset tidak berwujud. Didalam *Resource based theory* diungkapkan dengan menganalisis dan menginterpretasikan sumber daya perusahaan dapat untuk memahami mengenai bagaimana suatu perusahaan akan mencapai keunggulan kompetitifnya, yang meyakini bahwa perusahaan akan mencapai keunggulan apabila memiliki sumber daya yang unggul (Solikhah, dkk., 2010).

Kozlenkova, dkk. (2014) menjelaskan bahwa logika dasar teori ini didasarkan pada dua hal mendasar asumsi mengenai sumber daya perusahaan dan menjelaskan bagaimana sumber daya ini dapat menghasilkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan mengapa beberapa perusahaan dapat secara konsisten mengungguli perusahaan lain. Ada 4 karakteristik yang dijelaskan oleh Kozlenkova, dkk. (2014) untuk menilai bagaimana potensi sumber daya akan menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan yang disingkat dengan VRIO yang terdiri atas *valuable*, *rare*, *imitable*, dan *organization*.

Berikut adalah karakteristik VRIO :

- a. Berharga (*Valuable*). Sumber daya perusahaan dapat dikatakan bernilai jika sumber daya tersebut memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan dan menerapkan strategi yang dapat mengurangi biaya

perusahaan dan meningkatkan pendapatan perusahaan lebih banyak daripada saat sumber daya tidak ada.

- b. Langka (*Rare*). Sumber daya yang langka adalah sumber daya yang hanya dikendalikan oleh sejumlah kecil perusahaan pesaing. Apabila sumber daya tersebut bernilai tetapi tidak jarang, pemanfaatan sumber daya tersebut akan menghasilkan kesetaraan kompetitif, karena perusahaan lain yang juga memiliki sumber daya tersebut juga memiliki kemampuan untuk memanfaatkannya.
- c. Sumber daya tersebut benar-benar tidak sempurna (*Imitable*). Sumber daya yang tidak sempurna tidak dapat diperoleh melalui duplikasi atau substitusi langsung oleh perusahaan yang tidak memilikinya.
- d. Organisasi (*Organization*). Sumber daya perusahaan harus dapat diatur sehingga potensi kompetitif sumber daya dapat dimanfaatkan secara maksimal. Organisasi bertindak sebagai faktor penyesuaian yang memungkinkan perusahaan untuk sepenuhnya menggunakan manfaat yang terkandung dalam sumber daya tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut *Resource Based Theory* (RBT), *intellectual capital* memiliki potensi besar untuk memenuhi modal sumber daya manusia sehingga dapat menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Dengan keunggulan kompetitif dari *intellectual capital*, perusahaan dapat menggunakannya untuk bisa bersaing di pasar yang kompetitif dan mencapai kinerja yang optimal (Pratama, 2016)

2. *Legitimacy Theory*

Menurut Dowling dan Pfeffer (1975) teori legitimasi ini menjelaskan bahwa sebuah perusahaan atau sebuah entitas akan menggunakan sistem dan bergerak sesuai dengan sistem, norma, dan nilai yang digunakan pada lingkungan sosial di sekitar perusahaan atau entitas. O'Donovan (2002) berpendapat legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi merupakan manfaat atau sumber daya potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (*going concern*). Untuk mendapatkan legitimasi, organisasi harus beroperasi pada norma dan harapan masyarakat, serta organisasi perlu melakukan pengungkapan sukarela sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atau pemangku kepentingan (Deegan, 2002). Di saat ada ketidaksesuaian atau kesenjangan dari kedua sistem norma dan nilai, hal ini dapat menyebabkan munculnya ancaman dari pihak eksternal lingkungan sosial sekitar entitas terhadap entitas yang bersangkutan. Dalam penelitian ini teori legitimasi menghubungkan pengaruh antara *environmental performance* terhadap kinerja perusahaan, teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan dapat mempengaruhi serta dipengaruhi masyarakat pada tempat perusahaan tersebut melakukan aktivitas operasionalnya (Mahrani dan Soewarno, 2018). Hal tersebut sesuai dengan yang dinyatakan oleh Ermaya, dkk. (2020) bahwa *environmental performance* yang dianggap sebagai tanggungjawab sosial perusahaan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan karena jika perusahaan tersebut memiliki peringkat yang

baik dalam program kepedulian lingkungan hidup maka akan memberikan respon positif bagi para investor dan calon investor dan dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

Masyarakat sudah memiliki kesadaran terhadap dampak lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan sehingga terdapat konsekuensi apabila manajemen gagal melegitimasi kegiatan yaitu intervensi dari pemerintah yang merupakan badan terpilih untuk memperhatikan masalah masyarakat (Wilmshurst dan Frostr, 2000). Teori legitimasi juga merupakan salah satu teori yang dapat memberikan motivasi kepada manager atau perusahaan dalam mengungkapkan laporan berkelanjutan. Teori ini sangat bermanfaat dalam menganalisis perilaku organisasi, selain itu legitimasi juga dapat memberikan batasan-batasan kepada organisasi atau kelompok mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial dalam memperhatikan lingkungan (Ermaya, dkk., 2020). Pada dasarnya teori legitimasi merupakan suatu kondisi atau status, yang ada ketika suatu sistem nilai perusahaan kongruen dengan sistem nilai dari sistem sosial yang lebih besar dimana perusahaan merupakan bagiannya. Ketika suatu perbedaan yang nyata atau yang potensial ada antara kedua sistem nilai tersebut, maka akan muncul ancaman terhadap legitimasi perusahaan (Tahu, 2019).

Perusahaan yang secara sukarela mampu dan mau secara transparan mengungkapkan laporan lingkungannya secara otomatis akan diakui *stakeholder*, bahwa perusahaan telah melakukan tanggung jawab sosialnya secara baik. Dampak dari perbuatan ini adalah *stakeholder* semakin percaya

terhadap produk yang dihasilkan perusahaan, sehingga *stakeholder* akan membeli produk perusahaan. Hasil dari pembelian produk yang banyak oleh *customer* meningkatkan kinerja perusahaan (Ermaya, dkk., 2020).

3. *Agency Theory*

Agency Theory (Teori Keagenan) Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dan pemilik (*principal*). Agar hubungan ini dapat berjalan dengan baik, pemilik akan mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan kepada manajer. Teori keagenan dilandasi oleh tiga jenis asumsi, yaitu asumsi mengenai sifat dasar manusia, asumsi keorganisasian, dan asumsi informasi (Emirzon, 2007). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia, maka dapat diketahui bahwa antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*) saling mengutamakan kepentingan diri sendiri sehingga memunculkan *agency problems*. Teori keagenan dalam penelitian ini akan diteliti pada variabel jumlah rapat dewan pengawas syariah dan ukuran dewan pengawas syariah (Widayuni dan Harto, 2014). Dewan pengawas syariah merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan yang diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk mengatasi masalah agensi dan memastikan manajer agar bertindak atas nama pemegang saham sehingga mampu meningkatkan kinerja perusahaan (Nugroho, 2020).

Teori keagenan menjelaskan adanya hubungan keagenan atau kontrak kerja yang melibatkan antara dua pihak. Kontrak kerja terjalin antara pihak prinsipal dengan pihak agen. Agen menutup kontrak untuk melakukan tugas-tugas

tertentu bagi prinsipal, prinsipal menutup kontrak untuk memberikan imbalan pada agen (Hendriksen, 2001).

4. *Intellectual capital*

Intellectual capital pada umumnya didefinisikan sebagai pendorong nilai perusahaan yang mengubah sumber daya produksi menjadi aset dengan nilai yang meningkat dan sebagai kekuatan otak kolektif perusahaan. Menurut definisi ini, *intellectual capital* mencakup berbagai bentuk pengetahuan, informasi penting, kekayaan intelektual, dan pengalaman (Dzenopoljac, dkk., 2017). *Intellectual capital* saat ini semakin menjadi aspek penting di dalam keberlangsungan hidup perusahaan. Adanya globalisasi, inovasi teknologi dan persaingan bisnis yang ketat pada era sekarang ini memaksa perusahaan - perusahaan untuk mengubah cara mereka menjalankan bisnisnya. Sawarjuono dan Kadir (2003) menyatakan bahwa melalui penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi secara efisien dan ekonomis dapat memicu pertumbuhan organisasi berbasis *knowledge* yang dapat memberikan keunggulan kompetitif perusahaan serta menjadi senjata untuk memenangkan persaingan bisnis. Menurut PSAK No. 19, aktiva tidak berwujud adalah aktiva non moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif.

Ulum (2013) menyarankan model untuk mengukur *intellectual capital* pada perbankan syariah yaitu iB-VAIC™ (*International Banking Value Added Intellectual Coefficient*). Asumsi dasar iB-VAIC™ adalah bahwa *intellectual*

capital itu sendiri tidak dapat beroperasi secara mandiri tanpa dukungan modal finansial dan fisik terutama di perbankan syariah. Menurut Ulum (2013) iB-VAIC™ mengindikasikan kemampuan intelektual organisasi yang dapat juga dianggap sebagai BPI (*Business Performance Indikator*). iB-VAIC™ merupakan penjumlahan dari tiga komponen sebelumnya, yaitu iB-VACA, iB-VAHU, dan iB-STVA.

Model iB-VAIC™ pertama dimulai dengan VA menggunakan data laporan keuangan, standar pelaporan, dan regulasi terkait tentang perbankan syariah, kami mengidentifikasi akun-akun dalam laporan keuangan bank syariah untuk menyusun model iB-VAIC™. Berdasarkan hasil *focus grup discussion* (FGD) yang telah dilakukan, maka rumus yang digunakan untuk menghitung iB-VAIC™ adalah sebagai berikut: Tahap pertama dengan menghitung iB-Value Added (iB-VA). IB-VA dihitung dengan menggunakan cara yaitu sebagai berikut :

$$iB-VA = OUT - IN$$

OUT (*Output*) : Total pendapatan, diperoleh dari:

1. Pendapatan bersih kegiatan syariah = pendapatan operasi utama kegiatan syariah + pendapatan operasi lainnya - hak pihak ketiga atas bagi hasil dan syirkah temporer.
2. Pendapatan non operasional IN (*input*): Beban usaha/operasional dan beban non operasional kecuali beban kepegawaian/karyawan.

Value added (iB-VA) juga dapat dihitung dari akun-akun perusahaan sebagai berikut:

$$iB-VA = OP + EC + D + A$$

Keterangan :

OP : *operating profit* (laba operasi/laba usaha)

EC : *employee costs* (beban karyawan)

D : *depreciation* (depresiasi)

A : *amortization* (amortisasi)

Menghitung *iB-Value Added Capital Employed* (iB-VACA). Setelah menghitung VA selanjutnya dengan menghitung *Value Added Capital Employed* (iB-VACA). iB-VACA adalah indikator untuk iB-VA yang diciptakan oleh satu unit dari human capital. Rasio ini menunjukkan kontribusi yang dibuat oleh setiap unit dari CE terhadap *value added* perusahaan.

$$iB-VACA = \frac{VA}{CE}$$

Keterangan:

iB-VACA : *Value Added Capital Employed* : rasio dari iB-VA terhadap CE

iB-VA : *value added*

CE : *Capital Employed* : dana yang tersedia (total ekuitas)

Menghitung *iB-Value Added Human Capital* (iB-VAHU). iB-VAHU menunjukkan berapa banyak iB-VA dapat dihasilkan dengan dana yang dikeluarkan untuk tenaga kerja. Rasio ini menunjukkan kontribusi yang dibuat oleh setiap rupiah yang diinvestasikan dalam HC terhadap *value added* organisasi.

$$iB\text{-VAHU} = \frac{VA}{HC}$$

Keterangan :

iB-VAHU : *Value added Human Capital* (rasio dari iB-VA terhadap HC)

iB-VA : *Value added*

HC : *Human capital* (beban karyawan)

Menghitung *Structural Capital Value Added* (iB-STVA) Rasio ini mengukur jumlah SC yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu rupiah dari iB-VA dan merupakan indikasi bagaimana keberhasilan SC dalam penciptaan nilai.

$$iB\text{-STVA} = \frac{SC}{VA}$$

Keterangan :

STVA : *Structural Capital Value Added* (rasio dari SC terhadap iB-VA)

SC : *Structural capital* (iB-VA – HC)

iB-VA : *Value Added*

Menghitung *Value Added Intellectual Coefficient* (iB-VAIC™). iB-VAIC™ mengindikasikan kemampuan intelektual organisasi yang dapat juga dianggap sebagai BPI (Business Performance Indikator). iB-VAIC™ merupakan penjumlahan dari tiga komponen sebelumnya, yaitu iB-VACA, iB-VAHU, dan iB-STVA.

$$iB\text{-VAIC}^{\text{TM}} = iB\text{-VACA} + iB\text{-VAHU} + iB\text{-STVA}$$

5. *Environmental Performance*

Environmental performance adalah hasil dari sistem manajemen lingkungan yang didalamnya terdapat kinerja perusahaan yang berkaitan dengan dampak pengendalian lingkungan tersebut (Ikhsan, 2014). Menurut Allen dan Santamero (1997) dampak perubahan lingkungan di berbagai daerah menjadi perhatian mengingat peran intermediasi bank dalam perekonomian, perubahan lingkungan akan mempengaruhi semua sektor ekonomi dan relevan dengan investor dan lembaga keuangan, seperti halnya perubahan lingkungan akan mempengaruhi pertanian dan pasokan pangan, infrastruktur, curah hujan dan pasokan air melalui risiko yang sebagian dipahami, dan ini semua adalah sektor yang juga dibiayai oleh bank. Bank adalah pengalokasi sumber daya dan perantara antara peminjam dan investor. Adapun pemantauan yang didelegasikan sebagai gagasan investor tidak memiliki waktu dan keahlian untuk memantau peminjam untuk risiko gagal bayar (Diamond, 1996). Oleh karena itu, mereka terlibat dalam pembiayaan tidak langsung dengan menggunakan perantara (bank), yang memantau kontrak hutang (pinjaman) yang dikeluarkan oleh peminjam yang didanainya, dan menerbitkan kontrak hutang (deposito) yang tidak dipantau (Lewis dan Juravle, 2010). Sehingga kinerja lingkungan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, semakin baik kinerja lingkungan akan meningkatkan kinerja perusahaan karena dapat menurunkan resiko peminjam gagal bayar.

Kebutuhan untuk mengukur kinerja lingkungan bank berasal dari peran penting mereka dalam sistem keuangan sebagai perantara antara penabung dan

peminjam. Apalagi, pertumbuhan bisnis yang ramah lingkungan membuat bank perlu mempertimbangkan kembali model bisnisnya. Calon investor sekarang mencari perusahaan dengan kredensial operasi ramah lingkungan. Kajian ini dimulai dengan mengukur dan menyelidiki bank, menurut negara asalnya, yang berkinerja baik dalam menerapkan kebijakan lingkungan mereka sendiri (Bhima dan Nhamo, 2017).

Indikator lingkungan mencakup kinerja terkait material, energi, air, dan keluaran seperti emisi, limbah, limbah. Selain itu, mereka mencakup kinerja yang terkait dengan keanekaragaman hayati, kepatuhan lingkungan, dan informasi relevan lainnya seperti pengeluaran lingkungan dan dampak produk dan layanan (Bimha dan Nhamo, 2017).

6. Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah

Menurut (Ismainingtyas, dkk., 2020) mengatakan bahwa risalah rapat dewan pengawas syariah memuat keputusan dan opini syariah yang diambil dalam rapat dewan pengawas syariah, risalah rapat tersebut sudah diketahui dan disetujui oleh seluruh anggota dewan pengawas syariah. Pelaksanaan rapat dewan pengawas syariah dipersyaratkan dalam PBI No.11/33/PBI/2009 dan SEBI No.12/13/DPBS tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) mengatur bahwa rapat dewan pengawas syariah diselenggarakan minimal sekali dalam 1 (satu) bulan. Secara umum, semakin sering frekuensi rapat maka akan didapat hasil pengawasan yang lebih baik terhadap kinerja perusahaan.

Menurut Bathula (2008) rapat dewan pengawas syariah digunakan sebagai ukuran dari intensitas kegiatan dewan dan nilai dari dewan yang relevan. Salah satu kegiatan rapat dewan pengawas syariah adalah memberikan opini-opini mengenai semua kegiatan operasional, produk dan penyaluran dana termasuk mengawasi kegiatan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf. Menurut Amalia, dkk. (2019) semakin sering dewan pengawas syariah mengadakan rapat, maka fungsi pengawasan terhadap manajemen menjadi semakin efektif. Rapat dewan pengawas syariah sebagai komunikasi antar anggota dewan dalam mengawasi kinerja manajemen dalam tata kelola perusahaan yang dapat meningkatkan kinerja dan perkembangan perusahaan (Dewayanto, 2010).

Rapat juga dimanfaatkan dewan pengawas syariah untuk membahas dan menentukan kesesuaian antara kegiatan dan produk kinerja perusahaan dengan prinsip syariah. Pengungkapan jumlah rapat dewan pengawas syariah memastikan bahwa dewan pengawas syariah telah melakukan tugasnya dalam mengawasi kegiatan kinerja perusahaan (Hameed, dkk., 2004). Suryono dan Prastiwi (2011) menjelaskan bahwa melalui jumlah pertemuan, dewan pengawas syariah semakin mampu mendorong manajemen untuk melakukan praktik pengungkapan *sustainability report* sebagai media komunikasi perusahaan dengan *stakeholder* dalam rangka memperoleh legitimasi melalui pelaksanaan *good corporate governance* untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

7. Ukuran Dewan Pengawas Syariah

Khoirudin (2013) menyatakan jumlah anggota dewan pengawas syariah berjumlah 2-5 orang untuk Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, sedangkan untuk BPRS anggota dewan pengawas syariah sekurang-kurangnya harus berjumlah 2-3 orang. Anggota dewan pengawas syariah dapat merangkap jabatan sebagai anggota dewan pengawas syariah lain sebanyak 4 bank lain atau lembaga keuangan syariah bukan bank. Ketentuan mengenai jumlah anggota dewan pengawas syariah juga diatur dalam PBI No. 11/3/PBI/2009 yang menyatakan bahwa jumlah anggota dewan pengawas syariah paling sedikit adalah 2 (dua) orang dan paling banyak 50% dari jumlah anggota direksi.

Anggota dewan pengawas syariah terdiri dari ahli syariah yang sedikit banyak menguasai hukum dagang yang berlaku dan terbiasa dengan kontrak-kontrak bisnis. Anggota dewan pengawas syariah bersifat independen, dalam arti bahwa mereka tidak tunduk kepada pimpinan bank yang diawasinya. Dalam rangka menjamin independensi dewan pengawas syariah, hal-hal yang harus diperhatikan adalah: (a) anggota dewan pengawas syariah bukan staf bank; mereka tidak tunduk di bawah kekuasaan administratif bank; (b) mereka dipilih oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); (c) honorarium mereka ditentukan oleh RUPS; dan (d) dewan pengawas syariah mempunyai sistem kerja dan tugas-tugas tertentu seperti halnya badan pengawas lainnya (Misbach dan Irwan, 2017). Menurut Muttakin dan Ullah (2012), semakin banyak dewan pengawas syariah akan mendorong kinerja yang lebih baik karena dewan

pengawas syariah lebih memiliki pengalaman, kepakaran, keahlian, dan jaringan profesional serta sosial yang lebih baik akan menciptakan suatu mekanisme pengawasan yang juga lebih baik, sehingga tingkat kepatuhan syariah pada bank syariah akan meningkat.

Semakin besar jumlah anggota dewan pengawas syariah maka semakin besar pula pemantauan terhadap hukum dan prinsip-prinsip Islam. Dengan jumlah dewan pengawas syariah yang memadai maka pelaksanaan dan pengungkapan kinerja perusahaan menjadi lebih terkontrol. Percy dan Stewart (2010) menjelaskan bahwa fungsi dan tugas dewan pengawas syariah bisa dibagi antara anggota yang memungkinkan anggota-anggota tertentu untuk fokus pada pelaporan perusahaan sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

8. Kinerja Perusahaan

Kinerja perusahaan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Irhan, 2012). Kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan di manapun, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya (Jumingan, 2006). Selain itu tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diharapkan (Iskandar, 2018). Standar perilaku dapat berupa kebijakan

manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran (Febryani dan Zulfadin, 2003).

Kinerja ialah cerminan dari hasil yang dicapai perusahaan dalam seluruh kegiatan operasional baik didalam aspek keuangan, aspek pemasaran, aspek penghimpunan dana dan penyaluran dana, aspek teknologi maupun aspek sumber daya manusianya (Jumingan, 2006). Kinerja perusahaan adalah bentuk pencapaian perusahaan yang dapat di defenisikan dengan hasil yang telah di dapat atas aktifitas-aktifitas yang sudah dilakukan. Sehingga didefenisikan juga kinerja perusahaan yaitu analisis yang dibuat demi menilai apakah perusahaan tersebut sudah patuh terhadap seluruh aturan yang berlaku (Fahmi, 2012).

Dalam penelitian ini proksi dari kinerja perusahaan yang digunakan adalah *social performance*. Penerapan *social performance* dilembaga perbankan syariah mampu memberikan manfaat berupa memperkuat kontribusi kepada komunitas dan masyarakat yang diukur menggunakan kinerja sosial perbankan syariah. Namun, masih sedikit penelitian terkait pengukuran kinerja sosial bank yang dilakukan. Adapun tujuan kinerja sosial bank syariah mengacu pada sifat keadilan dan akuntabilitas sosial (Farook, dkk., 2011). Haniffa dan Hudaib (2007) menegaskan bahwa bank syariah diharapkan lebih bertanggungjawab secara sosial dari pada bank konvensional, sebagaimana Islam menekankan pada keadilan sosial. Banyak contoh praktek keadilan sosial yang diutamakan oleh Islam seperti penghindaran riba (riba), pajak agama (zakat) dan pinjaman tanpa bunga (qardhul hasan) (Rahman dan Bukair, 2013). Keadilan sosial juga

dapat didemonstrasikan melalui penyediaan model pinjaman keuangan Islami yang benar yaitu mudharabah dan musyarakah (Samad dan Hassan, 1999).

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Identitas Jurnal	Variabel yang digunakan	Hasil Penelitian
1	Azizah dan NR. <i>Jurnal Eksplorasi Akuntansi</i> , Vol. 2 No.1, 2020	Variabel Independen : Ukuran Dewan Pengawas Syariah Variabel Dependen: Kinerja Perusahaan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan
2	Ermaya dan Mashuri. <i>Jurnal Akuntansi Terapan</i> . Vol. 1 No.2, 2020	Variabel Independen : <i>Environmental Performance</i> Variabel Dependen: Kinerja Perusahaan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>environmental performance</i> berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan
3	Pratama, dkk. <i>Journal of Economics and Business</i> . Vol. 5 No. 1, 2020	Variabel Independen : <i>Intellectual Capital</i> Variabel Dependen: Kinerja Perusahaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>intellectual capital</i> berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan.

4	Nugroho. <i>Proceeding of National Conference on Accounting dan Finance</i> .Vol. 2, 2020	Variabel independen: Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah Variabel dependen: Kinerja Perusahaan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah rapat dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan
5	Amalia, dkk. <i>Jurnal Riset Manajemen</i> , 2019	Variabel Independen : Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah Variabel Dependen : Kinerja Perusahaan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah rapat dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan
6	Landion dan Lastanti. <i>Jurnal Akuntansi Trisakti</i> . Volume. 6 Nomor. 2, 2019	Variabel Independen : <i>Intellectual Capital</i> Variabel Dependen : Kinerja Perusahaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>intellectual capital</i> memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.
7	Putri dan Nuzula. <i>Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)</i> . Vol. 66 No. 1, 2019	Variabel Independen : <i>Intellectual Capital</i> Variabel Dependen: Kinerja Perusahaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>intellectual capital</i> berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan.
8	Tahu. <i>Jurnal Akuntansi, Audit dan Sistem Informasi Akuntansi</i> . Vol. 14. No. 1, 2019	Variabel Independen : Kinerja Lingkungan Variabel Dependen: Kinerja Perusahaan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan
9	Ausat. <i>Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan</i> . Vol.19 No.2, 2018	Variabel Independen : Ukuran Dewan Pengawas Syariah Variabel Dependen: Kinerja Perusahaan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan

10	Indrayani dan Risna. <i>Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Perpajakan Indonesia</i> . Vol.6 No. 1, 2018	Variabel Independen : Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah Variabel Dependen: Kinerja Perusahaan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah rapat dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan
11	Naseem, dkk. <i>Jurnal Riset Bisnis Terapan</i> . Vol.22 No.2, 2018	Variabel Independen : Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah Variabel Dependen: Kinerja Perusahaan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah rapat dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan
12	Nugraheni. <i>Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia</i> . Vol.22 No.2, 2018	Variabel Independen : Ukuran Dewan Pengawas Syariah Variabel Dependen: Kinerja Perusahaan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan
13	Magdalena, dkk. <i>Jurnal Ekonomi Syariah</i> . Vol.5 No. 2, 2017	Variabel Independen : Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah Variabel Dependen: Kinerja Perusahaan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah rapat dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan
14	Pratama dan Wibowo. <i>Jurnal Akuntansi dan Investasi</i> . Vol. 18 No. 2, 2017	Variabel Independen : <i>Intellectual Capital</i> Variabel Dependen : Kinerja Perusahaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>intellectual capital</i> memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.
15	Quttainah dan Almutairi. <i>Social Responsibility Journal</i> , 2016	Variabel Independen : Ukuran Dewan Pengawas Syariah Variabel Dependen: Kinerja Perusahaan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan

16	Kucukbay dan Fazlilar. <i>International Conference on Eurasian Economies</i> , 2016	Variabel Independen : <i>Environmental Performance</i> Variabel Dependen : Kinerja Perusahaan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>environmental performance</i> berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan
17	Nikmah dan Apriyanti. <i>Jurnal Akuntansi</i> . Vol.6 No. 2, 2016	Variabel Independen : <i>Intellectual Capital</i> Variabel Dependen : Kinerja Perusahaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>intellectual capital</i> memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.
18	Pratama. <i>Jurnal Internasional Penelitian Akademik dalam Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Manajemen</i> Vol. 6 No.4, 2016	Variabel Independen : <i>Intellectual Capital</i> Variabel Dependen : Kinerja Perusahaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>intellectual capital</i> berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.
19	Bourakba and Zerargui. <i>Issues in Business Management and Economics</i> . Vol. 3 No. 4, 2015	Variabel Independen : Ukuran Dewan Pengawas Syariah Variabel Dependen: Kinerja Perusahaan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan
20	Muhammad, dkk. <i>Journal of Cleaner Production</i> . Vol.102, 2015	Variabel Independen : <i>Environmental Performance</i> Variabel Dependen: Kinerja Perusahaan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>environmental performance</i> berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan
21	Andriana. <i>Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan</i> . Vol.2 No.1, 2014	Variabel Independen : <i>Intellectual Capital</i> Variabel Dependen: Kinerja Perusahaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>intellectual capital</i> berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan.

22	Rahman dan Bukair. <i>Asian Journal of Business and Accounting</i> . Vol.6 No.2, 2013	Variabel Independen : Ukuran Dewan Pengawas Syariah Variabel Dependen : Kinerja Perusahaan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan pengawas yariah berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan
23	Rahmawati dan Achmad. <i>Diponegoro Journal Of Accounting</i> . Vol.1 No.2, 2012	Variabel Independen : Kinerja Lingkungan Variabel Dependen: Kinerja Perusahaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan.
24	Dewayanto. <i>Fokus Ekonomi</i> , vol. 5 No. 2, 2010	Variabel Independen : Ukuran Dewan Pengawas Syariah Variabel Dependen: Kinerja Perusahaan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan
25	Titisari dan Alviana. <i>Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto</i> , 2010	Variabel Independen : Kinerja Lingkungan Variabel Dependen: Kinerja Perusahaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan.
26	Lindrianasari. <i>Jurnal Akuntansi dan Auditing</i> . Vol.11, 2009	Variabel Independen : <i>Environmental Performance</i> Variabel Dependen: Kinerja Perusahaan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>environmental performance</i> berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan

(Sumber : Diolah dari berbagai penelitian, 2020)

C. Pengembangan Hipotesis dan Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh *Intellectual Capital* terhadap Kinerja Sosial Perusahaan

Intellectual Capital menjalankan peran penting dalam penciptaan nilai dan pertumbuhan berkelanjutan perusahaan. Hal ini sejalan dengan *resource based theory* (RBT) yang menjelaskan bahwa *intellectual capital*

merupakan inti dari penciptaan nilai dan keunggulan bersaing perusahaan (Barney, 1991). Dari perspektif RBT, penciptaan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan sangat erat kaitannya dengan kemampuan perusahaan untuk memelihara sumber daya aset yang berharga, langka dan tidak tergantikan serta mengalokasikan dan menyebarkan sumber daya tersebut secara efektif (Barney, 1991). Perusahaan yang memiliki keunggulan bersaing yang berkelanjutan akan mampu memenangkan persaingan di pasar industri sehingga mampu menciptakan nilai dan mencapai kinerja bisnis yang optimal (Pratama, 2016).

Beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti hubungan antara *intellectual capital* dan kinerja perusahaan berhasil menemukan hubungan antara *intellectual capital* dan kinerja perusahaan oleh Pratama (2016), Nikmah dan Apriyanti (2016), Pratama dan Wibowo (2017), Pratama (2018), dan Landion dan Lastanti (2019) melakukan penelitian tentang pengaruh *intellectual capital* terhadap kinerja perusahaan menemukan hasil yang positif. Hal ini bahwa efisiensi modal manusia adalah pendorong utama reputasi perusahaan, serta mengungkapkan hubungan positif antara komponen *intellectual capital* dan kinerja perusahaan, serta perusahaan harus lebih memahami akan penggunaan modal intelektual yang efisien dan efektif membuat perusahaan mampu mencapai kinerja yang lebih tinggi (Landion dan Lastanti, 2019). Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₁: *Intellectual Capital* Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Sosial Perusahaan.

2. Pengaruh *Environmental Performance* terhadap Kinerja Sosial Perusahaan

Menurut teori legitimasi menjelaskan bahwa sebuah perusahaan atau sebuah entitas akan menggunakan sistem dan bergerak sesuai dengan sistem, norma, dan nilai yang digunakan pada lingkungan sosial di sekitar perusahaan atau entitas (Dowling dan Pfeffer, 1975). Perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan *stakeholder* perusahaan akan meningkatkan kinerja perusahaan. *Stakeholder* akan lebih tertarik investasi, memberikan pembiayaan kepada perusahaan yang juga melibatkan pengelolaan perusahaan terhadap lingkungan (Vivianita dan Nafasati, 2016). Meningkatnya pembelian produk perusahaan oleh pelanggannya menyebabkan peningkatan profitabilitas perusahaan. Setyaningsih dan Asyik (2016) juga menunjukkan bahwa perusahaan menjadi peduli terhadap lingkungan dikarenakan ada pihak-pihak luar yang mendorong, seperti *customer*, *stakeholder* dan pemerintah. Dorongan ini menuntut perusahaan bertanggungjawab terhadap lingkungannya sebagai akibat produksi yang dilakukan perusahaan.

Hasil penelitian sebelumnya yang meneliti hubungan antara *environmental performance* dan kinerja perusahaan berhasil menemukan hubungan antara *environmental performance* dan kinerja perusahaan. Seperti yang dilakukan oleh Muhammad, dkk. (2015), Kucukbay dan

Fazlilar (2016), Tahu (2019), Ermaya, dkk. (2020) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara *environmental performance* dan kinerja perusahaan. *Environmental performance* dapat menjadi bahan pertimbangan untuk melihat kinerja perusahaan hal ini dikarenakan citra positif perusahaan, perusahaan dengan kinerja lingkungan baik akan mendapat respon yang baik pula dari *stakeholder* dan berdampak pada peningkatan pendapatan perusahaan dalam jangka panjang (Ermaya, dkk., 2020). Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₂: *Environmental Performance* Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Sosial Perusahaan.

3. Pengaruh Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Sosial Perusahaan

Jumlah rapat dewan pengawas syariah merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan yang diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk mengatasi masalah agensi yang dapat dikemukakan pada saat pelaksanaan rapat dewan pengawas (Jensen dan Meckling, 1976) . Menurut Bathula (2008) rapat dewan pengawas syariah digunakan sebagai ukuran dari intensitas kegiatan dewan dan nilai dari dewan yang relevan, salah satu kegiatan rapat dewan pengawas syariah adalah memberikan opini-opini mengenai semua kegiatan operasional, produk dan penyaluran dana termasuk mengawasi kegiatan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf. Gray dan Nowland (2012) menyatakan bahwa kehadiran direktur

pada rapat dewan direksi dan komite, penting bagi direksi dan pemegang saham. Rapat merupakan salah satu cara yang bisa digunakan direktur untuk diskusi dan memberikan saran kepada manajemen perusahaan tentang kebijakan-kebijakan yang ditentukan. Sedangkan Suryono dan Prastiwi (2011) menjelaskan bahwa melalui jumlah pertemuan, dewan pengawas syariah semakin mampu mendorong manajemen untuk melakukan praktik pengungkapan *sustainability report* sebagai media komunikasi perusahaan dengan stakeholder dalam rangka memperoleh legitimasi melalui pelaksanaan *good corporate governance*.

Dalam penelitian terdahulu Naseem, dkk. (2017), Amalia, dkk. (2019), Nugroho (2020), menunjukkan bahwa jumlah rapat dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Menurut Amalia, dkk. (2019) hal ini berarti bahwa semakin sering dewan pengawas syariah mengadakan rapat, maka fungsi pengawasan terhadap manajemen menjadi semakin efektif. Rapat dewan pengawas syariah juga media komunikasi antar anggota dewan dalam mengawasi kinerja manajemen dalam tata kelola perusahaan yang nantinya akan meningkatkan kinerja dan perkembangan perusahaan Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₃: Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Sosial Perusahaan.

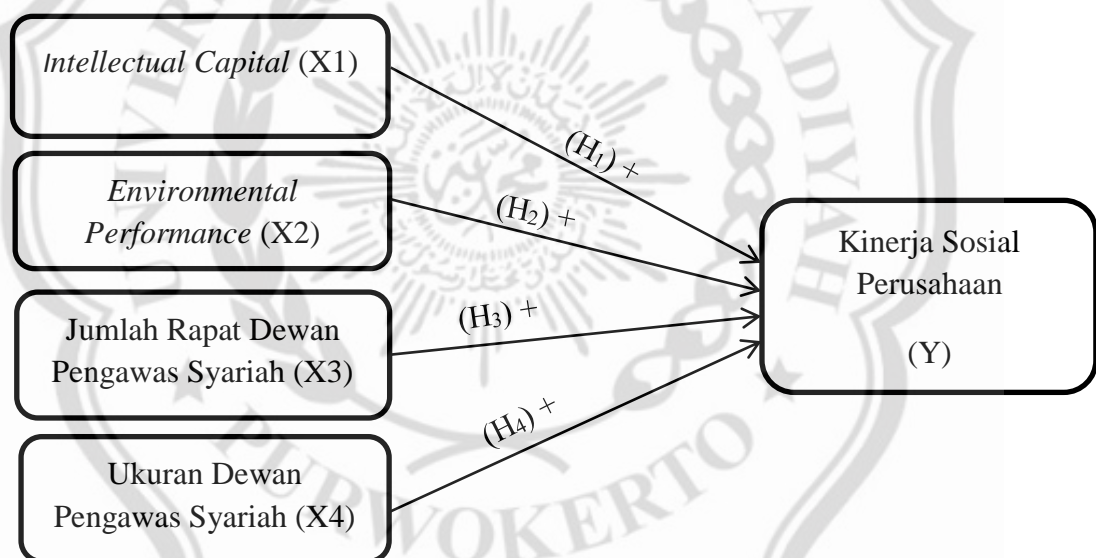
4. Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Sosial Perusahaan

Ukuran dewan pengawas syariah adalah jumlah dari anggota dewan pengawas syariah dalam suatu perusahaan (Khoirudin, 2013). Dewan pengawas syariah merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan yang diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk mengatasi masalah agensi dan memastikan manajer agar bertindak atas nama pemegang saham sehingga mampu meningkatkan kinerja perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Hal ini karena dewan pengawas syariah mempunyai wewenang mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, semakin banyak dewan pengawas syariah maka semakin efektif pula pengawasan terhadap kinerja perusahaan. Menurut Khoiruddin (2013) semakin banyak jumlah dewan pengawas syariah dapat meningkatkan level pengungkapan. Semakin besar jumlah anggota dewan pengawas syariah, maka kinerja perusahaan semakin efektif sehingga pengungkapan tanggung jawab sosial secara islami juga meningkat.

Berdasarkan penelitian terdahulu Dewayanto (2010), Rahma dan Bukair (2015), Quttainah dan Almutairi (2016) dan Nugraheni (2018) menemukan bahwa ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Menurut Dewayanto (2010) menyatakan bahwa jumlah dewan pengawas syariah berbanding lurus dengan kinerja perusahaan, jika jumlah dewan pengawas syariah dalam lembaga keuangan semakin banyak, maka pengawasan terhadap manajemen

perusahaan akan semakin baik serta membuat pengelolaan bank syariah akan sesuai dengan prinsip syariah, hal ini juga akan membuat tidak adanya penggunaan dana yang tidak memakai prinsip syariah didalam perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₄: Ukuran Dewan Pengawas Syariah Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Sosial Perusahaan.



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran